

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Sitem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang yang digunakan dalam peradilan tindak pidana korupsi kian merupakan sebuah sistem pembuktian yang efektif, terutama dalam mendukung kinerja Kejaksaan dalam mencari kebenaran sebuah tindak pidana korupsi, baik dalam proses penyidikan ataupun proses penuntutan. Hal ini karena terdakwa diharuskan memberikan keterangan saat diperiksa, mengenai keabsahan sumber kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana korupsi yang disangkakan kepadanya. Bahkan dalam persidangan seorang terdakwa juga diharuskan memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Ketentuan dalam sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang yang memberikan beban pembuktian kepada tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi akan menyulitkan tersangka atau terdakwa untuk meloloskan diri dari jeratan hukum. Konsekuensi tersebut tentu membawa pengaruh bagi Kejaksaan dalam rangka menangani perkara tindak pidana korupsi, karena dengan adanya sistem pembuktian tersebut maka di dalam persidangan yang dilakukan hanyalah sebatas penyesuaian bukti-bukti yang dihadirkan oleh terdakwa dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh pihak Kejaksaan. Proses penuntutan akan berakhir dan kemudian dilanjutkan ke

tahap pemeriksaan akhir apabila hasil perbandingan antara pembuktian dari pihak terdakwa sesuai dengan pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum, namun apabila hasil perbandingan tersebut tidak sesuai maka proses penuntutan akan terus dilanjutkan hingga Hakim merasa cukup baginya untuk mengambil kesimpulan guna dijadikan dasar penjatuhan putusan.

B. Saran.

Sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang adalah sistem pembuktian yang efektif bagi tindak pidana korupsi, maka penulis memberikan saran agar pihak Kejaksaan tetap menerapkan sistem pembuktian ini dalam persidangan tindak pidana korupsi agar tercapai hasil yang lebih optimal dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Edi Yunara, S.H., M.H., 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban pidana korupsi berikut studi kasus*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Evi Hartanti, S.H., 2007, *Tindak Pidana Korupsi edisi kedua*, SINAR GRAFIKA, Jakarta.
- F. Sugeng Istanto, 2007, *penelitian hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, 2001, Tim Penyusun Pusat Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta
- S. Adiwinata, 1977, *Kamus Istilah Hukum Latin-Indonesia, (alih bahasa)*, PT Intermasa, Jakarta.
- Yudi Kristiana, 2006, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono Hadisoeparto, S.H., *Pengantar Tata Hukum Indonesia edisi 4* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 125.

Website

- <http://Komisi Hukum Nasional-Republik Indonesia. Htm>, Suhadibroto, *Menyita Aset Koruptor*, 22-Desember-2004
- [http:// ppk.or.id](http://ppk.or.id), PPK(Program Pengembangan Kecamatan), Hk/SP2/ppkII, April 2005
- WWW.Kejaksaan.go.id.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1961 Nomor 254.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 Tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 255.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Tim
Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET. 15 /04.10/ES/ 12 /2008

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

Nama	: EDWARD ANGGA, ONGIRWALU
No Mahasiswa	: 04 05 08817 / H
Fakultas	: Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
Tingkat	: Akhir
Jurusan	: HUKUM PIDANA
Alamat	: Jln. Merican Baru No. 28 Yogyakarta.

Telah selesai mengadakan penelitian/riset di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**“ PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
PENERAPAN PEMBAGIAN BEBAN PEMBUKTIAN
PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI ”**

Demikianlah surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 10 DESEMBER 2008

An. ~~KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA~~

~~KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS~~



~~H. R. HUTAGALUNG, SH. CN.~~

~~JAKSA MADYA NIP 230020422~~



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 5413

Surat : Dekan Fak. Hukum - UAJY No : 1610/V
Tanggal: 25 September 2008 Perihal : Ijin Penelitian

Isi : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :
Nama : EDWARD ANGGA ONGIRWALU No. Mhsw : 8817/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Jabatan : PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN PEMBAGIAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Kategori : DIY
Waktu : Mulai tanggal 18 Oktober 2008 s/d 18 Pebruari 2009

Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Disampaikan Kepada Yth. :

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 18 Oktober 2008



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1994
5495/34

- : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/5413 Tanggal : 18/10/2008
1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

n Kepada : Nama : EDWARD ANGGA O. NO MHS / NIM : 040508817
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJY
Alamat : Jl. Mrican Baru No. 28, Yogyakarta
Penanggungjawab : G. Aryadi, SH., M. Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN PEMBAGIAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Responden : Kota Yogyakarta
: 18/10/2008 Sampai 18/01/2009
an : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

EDWARD ANGGA O.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : **22-10-2008**

Kepala Dinas Perizinan
Ka. Bag. Tata Usaha



**KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SURAT KETERANGAN

No : S.Ket. 04 / O.4.3 / Dps.2 / 01 / 2009

Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : EDWARD ANGGA ONGIRWALU
No. Mahasiswa : 04 05 08817 / H
Fakultas : Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
Tingkat : Akhir
Jurusan : Hukum Pidana
Alamat : Jln. Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Telah selesai mengadakan penelitian / riset di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta
dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**" PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENERAPAN PEMBAGIAN BEBAN
PEMBUKTIAN PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI "**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 23 Januari 2009

An. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI DIY

ASISTEN INTELIJEN

UB KASUS SOSIAL DAN POLITIK



ASEP SAFAUL BACHRI, SH, MH

JAKSA MUDA NIP.230025601